

# KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN NASIONAL MELALUI SENSUS PERTANIAN 2023 MENJAWAB TANTANGAN GLOBAL

<sup>1</sup>Supendi, <sup>2</sup>Dwi Puwroko

<sup>1</sup>SKF Pertanian dan IKKRT, BPS Provinsi DKI Jakarta, <sup>2</sup>Universitas Pramita  
Indonesia/Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/Ilmu Pemerintahan

<sup>1</sup>Jl. Kampus Pramita, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810, <sup>2</sup>Jl. Salemba  
Tengah No.36, RT.2/RW.4, Paseban, Senen, Jakarta Pusat

<sup>2</sup>dpurwoko209@gmail.com

*diterima 15 Agustus 2022*

*revisi 01 September 2022*

*diterbitkan 14 September 2022*

## Abstrak

Kebijakan Pemerintah sektor pertanian di Indonesia sangat penting dilakukan.. Sensus Pertanian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik memberikan kebutuhan data pertanian baik di level nasional maupun level global. Kebijakan dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) merancang agar hasil yang diperoleh berstandar Internasional. Sensus Pertanian berstandar Internasional mengacu kepada program FAO yang dikenal dengan *World Programme for the Census of Agriculture (WCA)*. Dengan terwujudnya Ketahanan Pangan mulai dari tingkat individu dan rumah tangga, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga Ketahanan Pangan Nasional menjadi cita-cita Nasional. Melalui kebijakan Pemerintah terutama ketahanan pangan, salah satu unsur penting ketahanan nasional dapat diimplementasikan. Karena itu, pemerintah secara intensif bekerjasama mewujudkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Ketahanan pangan menargetkan pada tahun 2024 swasembada gula industri dan 2026 swasembada daging sapi, menuju Visi Indonesia pada tahun 2045 menjadi Lumbung Pangan Dunia. Capaian kebijakan pangan di atas juga telah meningkatkan kesejahteraan petani. Ini terlihat dari indikator kemiskinan di perdesaan pada Maret 2021 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,53 persen pada September 2021. (BPS, 2021). Dalam mengawal dan memastikan agar proses transformasi struktural bisa berjalan tepat dan terarah, maka berbagai kebijakan yang telah dan akan dilakukan sangat perlu didukung oleh basis data pertanian yang akurat. Kemudian memperkuat infrastruktur, lembaga keuangan, pasar tani dan lainnya. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi profesional dan produktif. Aktor kunci kebijakan pembangunan pertanian adalah memanfaatkan hasil sensus pertanian. Ekosistem data pertanian yang strategis dan berkelanjutan. Kemudian ketersediaan dan aksesibilitas data dan kesadaran dari pengguna data bahwa data tersebut ada. Perlunya pemerintah membuat kebijakan yang pro terhadap sektor Pertanian tepat sasaran.

**Kata kunci :** *kebijakan sektor pertanian, Sensus Pertanian 2023, ketahanan pangan, ekosistem data, sumber daya manusia.*

## Abstract

*It is very important to carry out government policies in the agricultural sector in Indonesia. The Agricultural Census conducted by the Central Statistics Agency provides agricultural data needs both at the national and global levels. The policy in the 2023 Agricultural Census (ST2023) activities is designed so that the results obtained are of international standard. The International Standard Agricultural Census refers to the FAO program known as the World Program for the*

*Census of Agriculture (WCA). With the realization of Food Security starting from the individual and household levels, villages, sub-districts, districts, provinces to National Food Security becomes a national goal. Through government policies, especially food security, one of the important elements of national security can be implemented. Therefore, the government intensively cooperates to realize Food Security and Farmer Welfare. Food security targets in 2024 self-sufficiency in industrial sugar and 2026 self-sufficiency in beef, towards Indonesia's Vision in 2045 to become a World Food Barn. The food policy achievements above have also improved the welfare of farmers. This can be seen from the poverty indicator in rural areas in March 2021 at 13.10 percent, down to 12.53 percent in September 2021. (BPS, 2021). In guarding and ensuring that the structural transformation process can be carried out in a precise and directed manner, various policies that have been and will be implemented need to be supported by an accurate agricultural database. Then strengthen infrastructure, financial institutions, farmer's markets and others. Capacity building of Human Resources (HR) to become professional and productive. The key actor in agricultural development policy is to utilize the results of the agricultural census. A strategic and sustainable agricultural data ecosystem. Then the availability and accessibility of data and awareness of data users that the data exists. The government needs to make policies that are pro-Agricultural sector right on target.*

**Keywords:** *agricultural sector policy, 2023 Agricultural Census, food security, data ecosystem, human resources.*

## I. PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini, diuraikan beberapa kajian dan dasar dari pelaksanaan kegiatan sensus. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data. Penyelenggaraan kegiatan statistik merupakan serangkaian proses bisnis sebagai upaya penyediaan dan penyebarluasan data. Proses bisnis yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengacu pada proses bisnis standar internasional, yaitu *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)*. GSBPM mendefinisikan proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik dalam beberapa tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan, penyusunan desain kegiatan, implementasi desain kegiatan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, diseminasi, dan evaluasi kegiatan. Setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut perlu didokumentasikan sebagai bagian dari penyediaan dan penyebarluasan data. Penyelenggaraan kegiatan statistik didokumentasikan dalam bentuk metadata kegiatan statistik. Dengan demikian,

metadata kegiatan statistik memuat informasi yang menggambarkan penyelenggaraan kegiatan statistik pada setiap tahapan GSBPM.

Dalam kebijakan pemerintah terdapat inventarisasi metadata kegiatan statistik, dilakukan dengan menggunakan Formulir Metadata Statistik-Kegiatan (MS-Keg). Informasi setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik tercatat dalam Formulir MS-Keg. Formulir tersebut terdiri atas 8 (delapan) blok, yaitu penyelenggara, penanggung jawab, perencanaan dan persiapan, desain kegiatan, desain sampel, penjaminan kualitas, pengolahan dan analisis, serta diseminasi hasil. Pada bagian awal formulir terdapat informasi umum mengenai kegiatan statistik. Sektor kegiatan merujuk pada pada *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*, yaitu: no.1 Pertanian dan Perikanan sampai dengan no.22. Transportasi. (Peraturan BPS No.5 Tahun 2020, tentang petunjuk teknis metadata statistik).

Selanjutnya tahapan Identifikasi Standar Data Statistik dilakukan sebelum

memulai kegiatan produksi data statistik, produsen data terlebih dahulu menentukan target kegiatan yang akan dicapai, indikator yang akan digunakan sebagai capaian target dan variabel apa saja yang akan digunakan untuk mengukur capaian target. Pengertian indikator secara umum adalah variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Ketika dievaluasi secara berkala, sebuah indikator dapat menunjukkan arah perubahan di berbagai unit dan melalui waktu. Sementara variabel adalah suatu informasi yang ingin ditangkap dalam menghasilkan data pada kegiatan statistik. Secara sederhana, variabel adalah inti pokok poin pertanyaan dan/atau inti nilai dari isian tabel atau instrumen lain yang disusun untuk memperoleh data. Adapun tahapan dalam mengidentifikasi standar data statistik: a. Identifikasi indikator dan/atau variabel pada tahapan ini indikator dan/atau variabel diidentifikasi berdasarkan jenis indikator dan/ atau variabel tersebut. variabel dapat dibedakan menjadi variabel tunggal dan variabel turunan yang diperoleh dari kombinasi perhitungan lebih dari satu variabel tunggal. b. Penentuan cakupan indikator dan/atau variabel pada tahapan ini cakupan dari satu indikator dan/ atau variabel yang sama dapat digunakan dalam beberapa lingkup statistik yaitu statistik ekonomi, sosial, pertanian, neraca/analisis, sesuai dengan tujuan dari pengumpulannya (Peraturan BPS No.4 Tahun 2020, tentang petunjuk teknis tentang standart data statistik).

Dengan ditetapkannya Peraturan pemerintah No.51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik, telah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Penduduk Pertanian; dalam bab I Ketentuan Umum 1 dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan Sensus pertanian adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh petani, rumah tangga pertanian, dan perusahaan pertanian di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik pertanian pada saat tertentu, sedangkan Sensus ekonomi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh usaha dan atau perusahaan non

pertanian di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik usaha dan atau perusahaan pada saat tertentu. Dijelaskan dalam bab ii statistik dasar, sektoral, dan khusus bagian pertama statistik dasar Paragraf 1 Penyelenggaraan Pasal 2 (1) Pemerintah berkewajiban menyediakan statistik dasar. (2) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). (3) Dalam menyelenggarakan statistik dasar, BPS memperoleh data melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 3 (1) Sensus terdiri dari a. Sensus Penduduk; b. Sensus Pertanian; c. Sensus Ekonomi. (2) Waktu penyelenggaraan sensus, dilaksanakan pada : a. tahun berakhiran angka 0 (nol) bagi sensus penduduk; b. tahun berakhiran angka 3 (tiga) bagi sensus pertanian; c. tahun berakhiran angka 6 (enam) bagi sensus ekonomi. Pasal 5 (1) Pencacahan dalam sensus pertanian dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh petani, perusahaan pertanian, dan pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian. (2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup karakteristik petani, tanah, tanaman kegiatan usaha di bidang pertanian, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang pertanian. (Peraturan pemerintah No.51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik). Pasal 5 Ayat (1) Karakteristik pokok dalam sensus pertanian" adalah keterangan-keterangan pokok dalam sektor pertanian yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap seluruh petani dan perusahaan pertanian seperti luas lahan yang dikuasai, luas lahan yang diusahakan, sub sektor kegiatan, tenaga kerja yang digunakan dan sejenisnya. Karakteristik rinci dalam sensus pertanian" adalah keterangan-keterangan mengenai sektor pertanian yang lebih lengkap dan terinci yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap rumah tangga petani terpilih dan pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian terpilih. Pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian" adalah pengumpulan data yang dilakukan langsung pada obyek yang bersangkutan, misalnya

untuk mendapatkan data hasil panen dilakukan dengan penimbangan hasil panen langsung dari lahan/sawah, untuk mengetahui umur hewan ternak seperti sapi didapat dari menghitung gigi hewan yang bersangkutan, dan sebagainya.

Pasal 6 Ayat (1) Karakteristik pokok dalam sensus ekonomi" adalah keterangan-keterangan pokok kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap seluruh kegiatan di bidang ekonomi di luar sektor pertanian seperti produksi/omset, jumlah tenaga yang dipekerjakan, dan sejenisnya. Karakteristik rinci dalam sensus ekonomi" adalah keterangan-keterangan mengenai kegiatan usaha yang lebih lengkap dan terinci yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap perusahaan/unit usaha terpilih.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dalam Studi formal (Cooper; 2006) terkait Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian Nasional Melalui Sensus Pertanian 2023 Menjawab Tantangan Global. Melalui penjabaran suatu fenomena teori yang mendasari atau karakteristik berkaitan dengan suatu subjek pembahasan/ topik. Dalam ( Jaedun; 2011) Riset deskripsi bisa abstrak atau konkret. Deskripsi konkret misalnya perubahan profi umur dari populasi, bauran gender di tempat kerja, atau bauran etnik suatu komunitas. Deskripsi abstrak contohnya peningkatan/ penurunan tingkat ketidakadilan sosial, tingkat sekularitas masyarakat, atau berapa banyak kemiskinan dalam komunitas tertentu. Deskripsi yang tepat sangat bermanfaat dalam menetapkan kebijakan perubahan sosial atau pembangunan. Deskripsi yang baik juga dapat memprovokasi pertanyaan "mengapa" dalam penelitian eksplanatoris. ( Jaedun; 2011). Melalui riset evaluasi decision oriented, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi/data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan/ perumusan kebijakan. ( Jaedun; 2011).

Diharapkan dalam penelitian kebijakan ini, dapat membantu merumuskan, mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kualitas kebijakan,

Menjadi jelas bahwa kebijakan Sensus Pertanian 2023 merupakan pijakan untuk merancang masa depan (*pathways*) pertanian dan pangan ke depan" sensus pertanian indonesia dasar dan tujuan Pelaksanaan Dasar Pelaksanaan: Rekomendasi FAO dan Amanat UU. No. 16 Tahun 1997 (10 tahun sekali tiap tahun berakhir 3). Tujuan & Manfaat: Memberikan gambaran secara komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia hingga wilayah terkecil. Peningkatan kualitas statistik pertanian (sebagai kerangka sampel survei pertanian, sebagai benchmark statistik pertanian yang sudah ada). Peningkatan kualitas desain kebijakan: rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian.

mengukur dampak kebijakan baik melalui pendekatan-pendekatan kualitatif. Penelitian kebijakan dapat dinyatakan hadir untuk mengilmiahkan kebijakan atau menghasilkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini bermaksud memaparkan secara jelas kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian dan ragamnya serta aplikasinya..

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bahwa Kebijakan Pemerintah sektor pertanian memiliki peran penting dalam meredam dampak krisis pangan dan energi terhadap ekonomi nasional. Data dari beberapa rilis BPS memperlihatkan telah terbukti bahwa pertanian di Indonesia berperan penting selama pandemi, sebutlah beberapa indikator berikut; Sektor pertanian (termasuk perikanan dan kehutanan) berkontribusi sebesar 13,28% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2021 dan tetap tumbuh positif saat kontraksi ekonomi akibat pandemi, Serapan tenaga kerja di sektor pertanian tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya (sekitar 29,96% pada Februari 2022), Tumpuan bagi low skilled labours dan menjadi bantalan ketenagakerjaan selama pandemi, Ekspor produk pertanian dan olahannya merupakan penyumbang utama surplus neraca perdagangan barang Indonesia pada masa

pandemi (68% pada 2020 dan 65% pada 2021). Di tengah krisis pangan dan energi global, sektor pertanian memiliki peran krusial dalam meredam tekanan inflasi yang dipicu komponen pangan ber gejolak (*volatile foods*).

Saat ini sebagai salah satu pasar komoditas pangan terbesar di dunia dengan potensi populasi mencapai 270,20 juta jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif (70,72 persen). yang cenderung konsumtif. Indonesia juga memainkan peran sebagai produsen utama (*main Suppliers*) global sejumlah komoditas pertanian strategis, dengan luas lahan baku sawah mencapai 7,46 juta hektar (BPS, 2019), budidaya pertanian melibatkan sekitar 27,68 juta rumah tangga (BPS, 2018). Begitu juga Indonesia memerankan pemasok beberapa komoditas Pertanian Strategis, antara lain Kelapa Sawit menempati peringkat 1 dunia (2021) , padi peringkat 4 dunia (2021) diambil dari (sumber <https://www.indexmundi.com>). Sedangkan produk Komoditi Kakao menempati peringkat 6 Dunia (2021), dan Perikanan menempati peringkat 3 dunia (2021) (sumber: <https://www.statista.com/statistics>).

Atas dasar potensi tersebut, perlunya Indonesia melakukan transformasi sistem pertanian dan pangan Indonesia menentukan masa depan pangan dan pertanian dunia, agar berhasil menjadi pemenang bukan pecundang dalam sektor ini. Beberapa potensi strategis yang perlu diperhatikan untuk bisa maju sejajar dengan negara-negara maju lainnya adalah ; Potensi petani muda dan melek teknologi, Jumlah penduduk usia produktif 70,72 persen (Sumber: SP2020), Keanekaragaman hayati (biodiversity) terbesar di dunia, Kondisi agroklimat yang sangat mendukung, Curah hujan dan energi matahari melimpah, Potensi lahan pertanian dan sumber daya kelautan sangat besar, Luas daratan mencapai 1,9 juta km<sup>2</sup>, Luas wilayah perairan mencapai 6,3 juta km<sup>2</sup>.

Tantangan disisi Kualitas SDM Pertanian Ageing farmers & regenerasi petani, Dominasi pertanian skala kecil dan tidak berkelanjutan, Pengetahuan dan adopsi teknologi yang masih rendah. Disisi

tantangan Produk Pertanian Konversi lahan pertanian, Tekanan permintaan pangan domestik terus meningkat, Dukungan sarana dan prasarana produksi belum optimal, Lemahnya implementasi *food losses dan waste management*. Disini perlunya Transformasi sistem pangan dan pertanian untuk lebih inovatif, berdaya saing, tangguh dan berkelanjutan adalah kata kuncinya.

Kebijakan Pemerintah terutama Sensus Pertanian 2023 yang tepat, dapat menjawab tantangan transformasi sistem pertanian dan pangan nasional. Beberapa analisisnya; Pada pertemuan antar negara-negara G20, dimana merupakan sebuah platform multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. G20 memiliki posisi yang strategis di dalam menentukan masa depan pertumbuhan ekonomi dunia. Salah satu agenda yang dibahas adalah Pertanian. Tema yang diangkat oleh *Agriculture Work Group G20 Indonesia Presidency* adalah: *Balancing production and trade to fulfil food for all*. Dengan tiga (3) isu prioritas: Membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh secara berkelanjutan Mendorong terciptanya perdagangan lintas batas yang terbuka dan terprediksi, Serta mengembangkan pertanian kewirausahaan dan digitalisasi. Hal ini searah dengan agenda besar kegiatan Sensus Pertanian 2023 tahun depan yang mengangkat tagline: ST2023 Mencatat Pertanian Indonesia Untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Sensus dan Survei Pertanian Terintegrasi mengumpulkan data untuk memotret ketangguhan sistem pertanian dan pangan Nasional.

Data-data strategis yang dikumpulkan antara lain; Informasi terkait demografi petani (umur dan tingkat pendidikan), Alat, mesin pertanian, dan teknologi pertanian, Skala usaha, kelembagaan, akses kredit dan asuransi, akses sumber daya lahan, volume dan nilai produksi komoditas pertanian, Penyuluhan, dampak perubahan iklim, penggunaan pupuk, pestisida, dan bibit rekayasa genetika. Dengan data yang dimiliki ini akan dipotret untuk menciptakan Pertanian tangguh; Bertumpu pada ilmu pengetahuan

dan memanfaatkan kemajuan teknologi, Memperkuat mekanisme pasar, Efisien dan memiliki produktivitas tinggi, Berdaya saing serta memiliki mutu dan keunggulan, Dikelola oleh petani yang profesional dan berkualitas.

Begitu juga kebijakan hasil Sensus Pertanian Tahun 2023 berperan Strategis dalam Pengukuran SDGs 2.4.1 mencakup 3 dimensi dengan 11 tema dan 11 sub-indikator: untuk capaian tahap di tahun 2023 terkait Dimensi Ekonomi ; dengan tema Produktivitas lahan (Nilai produksi per hektar), Profitabilitas (pendapatan bersih petani), dan indikator Ketahanan (Mekanisme mitigasi resiko). Kemudian dilanjutkan tahap tahun 2024 di Dimesi Lingkungan tema kesuburan tanah (Prevalensi degradasi tanah, Penggunaan air (Kondisi ketersediaan air), resiko penggunaan pupuk (Manajemen penggunaan pupuk), Resiko Penggunaan Pestisida (Manajemen Penggunaan Pestisida), dan keanekaragaman hayati (Praktek dukungan penggunaan keanekaragaman hayati berbasis Agro).

Pembangunan Pertanian yang ditopang oleh *evidence-based decision making* mejadi sangat krusial. Aktor kunci pembangunan pertanian adalah memanfaatkan hasil sensus, ekosistem data pertanian yang strategis dan berkelanjutan. Ketersediaan dan aksesibilitas data perlu tapi tidak cukup agar data dapat digunakan. Revelansi data dengan kebutuhan pengguna Data tersedia dalam format yang dapat digunakan dan mendapatkan kepercayaan dari pengguna Pengguna memiliki keahlian yang sesuai untuk meninterpretasi, memahami, dan mengpalikasinya secara tepat (Diadopsi dari paparan World Bank berjudul Indonesia Inception Meeting, 50x230 Data-Smart Agriculture).

Dengan Ekosistem Data Pertanian *“The data ecosystem is the community of stakeholders who engage with data, the data assets\* with which they interact, and the rules, norms, and structures that govern those interactions. Intermediaries: a broad term that covers a range of different activities and governance models for organizations that facilitate greater access*

*to or sharing of data”*. (data sets, products, platforms, technologies, and more).

Kebijakan dalam sektor pertanian akan menjadi salah satu kunci kemenangan suatu negara dalam menghadapi persaingan global, seiring populasi penduduk, kebutuhan akan pangan dan globalisasi.

#### IV. KESIMPULAN

Hasil Sensus Pertanian tahun 2023 merupakan pijakan dalam kebijakan pemerintah untuk merancang masa depan (*pathways*) pertanian dan pangan ke depan. Pelaksanaan dasar rekomendasi FAO dan amanat uu. no. 16 tahun 1997 (10 tahun sekali tiap tahun berakhir 3). tujuan & manfaat: memberikan gambaran secara komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia hingga wilayah terkecil. Peningkatan kualitas statistik pertanian (sebagai kerangka sampel survei pertanian, sebagai benchmark statistik pertanian yang sudah ada). Peningkatan kualitas desain kebijakan: rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian. Sebagai contoh sebagai kebijakan dalam penyusunan; 1. Distribusi pupuk bersubsidi yang efektif dan efisien; 2. penyediaan basis data UMKM sektor pertanian.

Sensus Pertanian 2023 adalah momentum peningkatan kualitas desain kebijakan strategis pembangunan pertanian nasional. Informasi strategis yang dihasilkan ST2023 antara lain; Direktori pelaku usaha pertanian (*by name by address*); Struktur demografi petani ; Lahan pertanian. menurut penggunaan sampai level desa; Geospasial statistik pertanian; Volume dan nilai produksi komoditas pertanian; Penggunaan teknologi modern pada usaha pertanian; Data kelompok tani menurut desa (melalui hasil podes ST2023); Indikator global; (*Small Scale Food Producer*, Indikator SDG 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, dan 5.a.1); Data urban farming, petani milenial, dan perhutanan sosial; Dampak OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI); Penyuluhan dari aparat/pihak Dinas Pertanian Keanggotaan dalam kelompok tani; Penggunaan pupuk dan pestisida; Penggunaan bibit rekayasa genetika; Informasi bantuan yang diterima petani; Akses terhadap kredit dan asuransi.

Dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintah.

Dari kesimpulan di atas, kami mengusulkan beberapa saran, yaitu diharapkan dengan hasil kebijakan Sensus Pertanian 2023 yang tepat sasaran, Reformasi penyaluran subsidi pupuk melalui perbaikan data targeting; Perbaikan tata kelola basis data pertanian; Pengendalian laju konversi lahan pertanian, khususnya sawah; Rekrutmen petani milenial untuk mendorong regenerasi petani; Kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan; Peningkatan kesejahteraan masyarakat petani kawasan hutan melalui Program Perhutanan Sosial; Modernisasi sektor pertanian melalui adopsi mekanisasi modern dan digitalisasi pertanian (*smart farming 4.0*) dapat berjalan dengan baik, sehingga sektor pertanian dapat meningkatkan produktifitasnya.

Kebijakan pokok pembangunan pertanian adalah kebijakan promosi dan proteksi, yang diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan nasional yang terutama disandarkan pada produksi pangan dalam negeri, meningkatkan daya saing produk pertanian serta kesejahteraan petani. Kebijakan promosi dilaksanakan

melalui berbagai dukungan dan fasilitasi Pemerintah kepada masyarakat untuk mendorong peningkatan produktivitas dan produksi padi dan bahan pangan lainnya, sehingga efisiensi dan daya saing beras di pasar dalam negeri meningkat sehingga dapat menurunkan tingkat ketergantungan konsumsi pangan dari produk impor.

Kebijakan proteksi diterapkan untuk melindungi petani dari dampak negatif atas produk impor yang merugikan produsen. Dalam hal ini Pemerintah menerapkan kebijakan tarif bea masuk bagi impor beras. Menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan disektor Pertanian. Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi dan ekspor yang sangat penting bagi percepatan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan terutama di sektor pertanian.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah koordinasi dengan sektor lain yang terkait seperti tumpang tindih pemanfaatan lahan antara pertambangan dan kehutanan, selain itu masih dirasakan adanya permasalahan dalam penerapan otonomi daerah di sektor pertanian, pertambangan, dan kehutanan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anggaran, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung : Pustaka Setia

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Budiardjo, Miriam. 1978. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama

Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Islamy, M. Irfan. 1992. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara

Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Gaya Media

Prastowo, Andi. 2016. Memahami metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media

Pasalong, Harmani. 2004. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta

Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Bandung: ALFABETA

Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik. Bandung. PT. Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta:Bandung

Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Bandung : ALFABETA

Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Analisis Kebijakan Publik 205

Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik. Bandung. PT. Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta:Bandung

Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Bandung : ALFABETA

Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan). Yogyakarta: Penerbit Ombak

Suharno,2013.Dasar-dasar kebijakan publik. Yogyakarta: Ombak.

Sudarmawan Danim, 2005, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan Publik, Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Samodrs. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan. Jakarta : Bumi Aksara

Wahab, Solichin Abdul. 2016. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan. Jakarta : Bumi Aksara

#### **Dokumen**

Paparan. [KBPS] Momentum Kolaborasi untuk Pertanian Tangguh dan Berkelanjutan Riley, Jenn. 2017.*Understanding Metadata. Baltimore: National Information Standards Organization.*

Tata Laksana Penyelenggaraan Statistik, Buku Pedoman 2021, BPS

UK Data Service. 2012. “*Catalogue metadata*”.

UNECE. 2009. *Statistical Metadata in a Corporate Context: A guide for managers.* Geneva: United Nations.

UNSD. 2017. “*Data and metadata dissemination: an introduction*”.

#### **Dokumen Perundangan**

Peraturan BPS No.4 Tahun 2020, tentang petunjuk teknis tentang standart data statistik

Peraturan BPS No.5 Tahun 2020, tentang petunjuk teknis metadata statistik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

Peraturan pemerintah No.51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik

#### **Dokumen Elektronik**

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220615/12/1543983/adu-restriksi-ekspor-global-mana-yang-paling-membatasi>, akses terakhir 16 Agustus 2022

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6179712/15-negara-yang-berpotensi-reseksi-indonesia-termasuk>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220616122856-4-347612/ngeri-krisis-pangan-energi-nyata-jokowi-sudah-ingatkan>.

<https://www.bps.go.id/news/2022/01/21/452/sensus-pertanian-berstandar-internasional.html>

<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2201>

<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2201>

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>

<https://www.statista.com/statistics>

<https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/document/metadata.aspx>. Diakses pada 9 Maret 2022.

<https://unstats.un.org/wiki/display/M2CG/B.+Data+and+metadata+dissemination%3A+an+introduction>. Diakses pada 9 Maret 2022.